

## ANALIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN HASIL PEMEKARAN WILAYAH INDRAGIRI (KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Riko Handoko Harahap, H.B.Isyandi & Eka Armas Pailis

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Riau

e-mail : rikohandoko\_harahap@yahoo.com

### ABSTRACT

*This research aims to determine the classification of economic growth and regional changes before and after autonomy in the area of Indragiri, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir and Kuantan Singingi regencies. The data used is secondary data compiled from publications or data published by BPS which includes the PDRB data ADHK 1995-1999 and 2014-2018, population number 1995-1999 and 2014-2018. The classification between the districts is calculated using Tipologi Klassen, while for income inequality is calculated using the Williamson index. The results of the analysis using Tipologi Klassen at the time of 1995-1999 showed that the district Indragiri Hulu entered the area forward, District Indragiri Hilir developed area but depressed and Kabupaten Kuantan Singingi rapidly developing areas, while the research results in the period 2014-2018 showed that the district Indragiri Hilir entered into the category of developing areas rapidly, while the district Indragiri Hulu and Kuantan Singingi Regency entered in the category of areas developed but depressed which means in the period before the autonomy and after Region. As for the results of the analysis using the Williamson index of districts in the Indragiri region, the income gaps between the regions are low with the average of the Williamsonnya index 0.07 for the period 1995-1999 and during the period 2014-2018 or after the autonomy of the value of the Wiliamson index indicates the value of 0.09 index which means that it is sufficiently low or evenly.*

**Keywords:** *Economic development, income gap, klassen typology, and williamson index*

### LATAR BELAKANG PENELITIAN

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau membubarkan Provinsi Sumatera Tengah dan membentuk 3 Provinsi baru yaitu Sumatera barat, Jambi dan Provinsi Riau. Adapun yang ikut jadi bagian Provinsi Riau adalah Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu: Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu kotanya Tembilahan, terdiri dari delapan Kecamatan, sekarang 20 Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Rengat ibukota Rengat, Kecamatan Pasir Penyus ibukota Air Molek, Kecamatan Seberida ibukota Pangkalan Kasai, Kecamatan Peranap ibukota Peranap, Kecamatan Kuantan Hilir ibukota Baserah, Kecamatan kuantan tengah ibukota Taluk Kuantan, Kecamatan. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi dan Kecamatan Singingi ibukota Muara Lembu. Seiring perkembangannya, Pada tahun 1996 terjadi penambahan Kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan

Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan yang baru adalah Kecamatan Benai ibukota Benai, Kecamatan. Kelayang ibukota Simpang Kelayang, Kecamatan. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 Kecamatan.

Salah satu buah dari hasil reformasi tersebut adalah sebuah sistem pemerintahan yang menghendaki pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, namun tentu saja tetap berada di dalam pattern negara kesatuan Hal ini yang kemudian direpresentasikan dengan lahirnya otonomi daerah.

Secara filosofisnya Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi Kesenjangan antar Wilayah, akan tetapi Permasalahan yang kemudian lahir adalah bahwa Desentralisasi ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena akan melahirkan dampak, yaitu adanya perbedaan hasil pembangunan baik secara ekonomi maupun non ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan dalam unsur kegiatan ekonomi, baik secara potensi daerah, kualitas pemerintahan dalam menata kelola ekonomi daerah, maupun keterlibatan *stakeholder* dalam aktivitas ekonomi, dan juga adanya perbedaan dalam Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Latar Belakang Daerah.

Seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Salah satunya adalah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang merupakan fokus Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembangunan Indonesia. Fokus tersebut melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi, diharapkan Indonesia menjadi 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2025 dan 8 besar pada 2045. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)

Pemerintah sudah membagi wilayah menjadi beberapa koridor, yaitu antara lain : 1) Koridor Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, 2) Koridor Jawa sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional, 3) Koridor Kalimantan sebagai Pusat Produksi dan Pengelolaan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional, 4) Koridor Sulawesi sebagai pusat Produksi dan Pengelolaan hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional, 5) Koridor Bali dan Nusa Tenggara sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, dan 6) Koridor Papua dan Kepulauan Maluku sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional.

Pemerintahan Joko Widodo juga memiliki upaya dalam mengatasi permasalahan dalam perekonomian bangsa ini yaitu yang disebut dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) regulasi Pemerintah yang dibuat untuk memperbaiki perekonomian Nasional dalam bidang peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan ekspor, peningkatan daya saing industri dan perluasan basis produksi Nasional pada sektor-sektor ekonomi yang nantinya akan meningkatkan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia. Akan tetapi pada masa otonomi daerah saat ini, tentu pelaksanaan dan kebijakan diberi kewenangan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat

pembangunan dan mengurangi ketimpangan di wilayahnya. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, maka dari itu diperlukan data dan informasi secara objektif sehingga dapat memberikan gambaran yang menunjukkan struktur perekonomian dan gambaran ketimpangan pada suatu wilayah, khususnya pada Kabupaten-Kabupaten di wilayah Indragiri yang nantinya diharapkan menjadi tolok ukur dan informasi yang diharapkan dapat memberikan orientasi pada berbagai arah dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pertumbuhan ekonomi adalah unsur penting didalam suatu proses pembangunan suatu wilayah dimana merupakan tujuan utama dalam rencana suatu pembangunan selain pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita atau pendapatan riil, jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil.

Menurut Mukmin (2017) pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adapaun pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Dahlan (2001), Pertumbuhan Ekonomi merupakan Suatu ukuran utama keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan, dan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat pula dinikmati oleh masyarakat yang berbeda dilapisan atas hingga lapisan paling bawah, baik terjadi dengan sendirinya maupun adanya campur tangan dari pemerintah.

Simon Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznets "U-terbalik" karena perubahan *longitudinal (time series)* dalam distribusi pendapatan.

Ketimpangan / Disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Syafrizal,2012).

Ketimpangan antar wilayah pada umumnya terjadi karena perbedaan *endow factor* yang dimiliki oleh masing-masing wilayah/daerah berdasarkan demografi dan faktor-faktor kekayaan yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah.

Menurut Syafrijal (2012). Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah yaitu :

#### 1. Perbedaan Kanfungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang cukup murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Konsisi ini mendorong perumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih Kecamatanil hanya akan dapat memproduksi barang-barang produksi dengan biaya yang lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

#### 2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktifitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi rendah.

#### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik disponsori oleh pemerintah atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena apabila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

#### 4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

#### 5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh system pemerintahan daerah yang dianut. Bila system pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana system pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah.

Menurut Adelman dan Cynthia Taft Morris (2014) menjelaskan bahwa terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara-negara sedang berkembang yaitu :

- a) Tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita.
- b) Terjadi inflasi, yaitu kondisi dimana bertambahnya pendapatan uang secara proposional, yang tidak diikuti dengan penambahan produksi barang-barang.
- c) Pembangunan antar daerah yang tidak merata
- d) Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga menyebabkan presentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, sehingga pengangguran menjadi bertambah.
- e) Rendahnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan industry substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industry mengalami kenaikan, hal ini terjadi untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- g) Akibat adanya tidak elastisnya permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara yang sedang berkembang memburuk di dalam perdagangan dengan negara maju.
- h) Hancurnya industry kerajinan rakyat, industry rumah tangga, dan lain-lain.

Ketimpangan mengacu pada standar hidup relative dari seluruh masyarakat. Sebab ketimpangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan diberbagai wilayah dan daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan diberbagai wilayah tersebut. Dwi Nugraheni (2010)

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk kurun waktu (*time series*) tahunan mulai dari sebelum otonomi daerah adalah tahun 1995-1999 dan setelah otonomi daerah adalah tahun 2014-2018 yang bersifat data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Penulis dalam menyusun tesis ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui data publikasi. Serta kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa penelitian ini. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singigi, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber website publikasi yang bersangkutan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, pengumpulan data melalui studi kepustakaan bertujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin mengenai objek serta elemen-elemen yang terkait dalam penelitian ini.

Metode analisis data pertama yang digunakan yaitu alat analisis Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*hight growth and hight income*), daerah maju tapi tertekan (*hight income but low growth*), daerah berkembang cepat (*hight growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth dan low income*). Formulasi alat analisis ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen**

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB Perkapita (y)	
	$y_i < y$	$y_i > y$
1	2	3
$r_i > r$	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi (daerah berkembang cepat) (II)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi (daerah cepat maju dan cepat tumbuh ) (I)
$r_i < r$	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah (daerah relatif tertinggal) (III)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah (daerah maju tapi tertekan) (IV)

Keterangan :

- $r_i$  = Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten
- $y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten
- $r$  = Pertumbuhan Ekonomi PDRB Wilayah Koridor Indragiri i
- $y$  = PDRB Perkapita Wilayah Koridor Indragiri i

Metode analisis data kedua yang digunakan adalah Indeks Williamson, Tingkat ketimpangan regional suatu daerah adalah perhitungan tingkat penyebaran PDRB per Kapita baik kecamatan atau Kabupaten terhadap rata-rata PDRB per

Kapita wilayah referensinya. Tingkat penyebaran dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Wiliamson. (Syafrizal.2012)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

- IW = Indeks Wiliamson
- n = Jumlah Penduduk rata-rata seluruh daerah
- $f_i$  = Jumlah Penduduk pada Kabupaten ke-i
- $Y_i$  = Pendapatan per Kapita Kabupaten ke-i
- Y = Pendapatan per Kapita seluruh daerah

Indeks Wiliamson berkisar antara 0 s/d 1

Bila IW < 0,3 maka Ketimpangan pendapatan wilayah rendah

Bila IW < 0.3 – 04 maka ketimpangan pendapatan wilayah sedang

Bila IW < 0.4 maka ketimpangan pendapatan wilayah tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen membagi daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita wilayah. Sebelum mengkarakteristikan wilayah anatr Kabupaten di Wilayah Indragiri berikut menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten yang berada diwilayah Indragiri.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Otonomi Daerah (1995 hingga 1999) dan Setelah Otonomi Daerah periode (2014 hingga 2018)**

Pertumbuhan Ekonomi			
Sebelum Otonomi	Persentase	Setelah Otonomi	Persentase
Kabupaten Indragiri Hulu	5.11	Kabupaten Indragiri Hulu	2.75
Indragiri Hilir	4.97	Indragiri Hilir	4.71
Kuantan Singingi*	5.17	Kuantan singingi	3.19

Sumber : Data Olahan (2020)

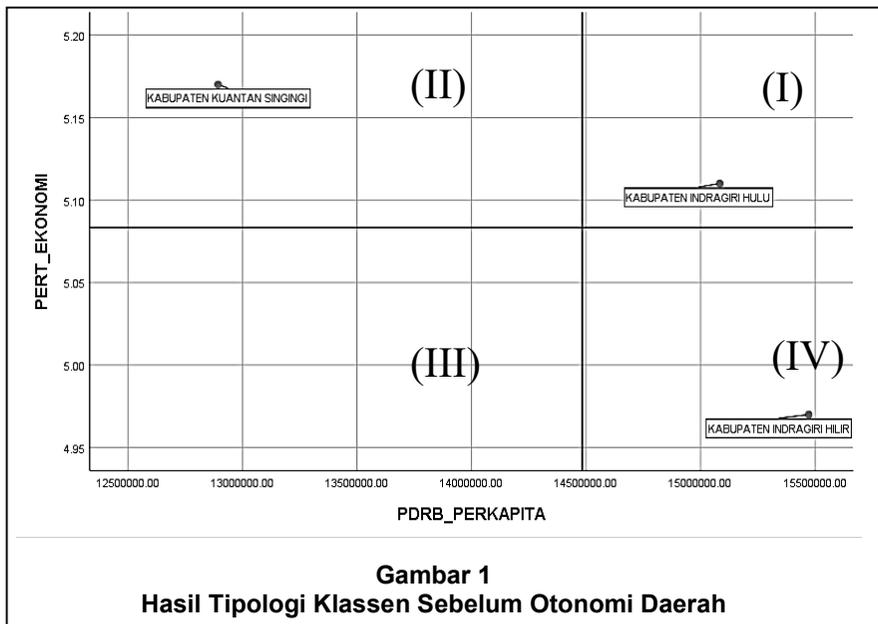
Pada Tabel 2 ada perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, sebelum otonomi daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah Otonomi Daerah Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah Kabupaten Indragiri Hilir dimana Kabupaten ini pada masa sebelum otonomi daerah adalah kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling rendah, dan untuk Kabupaten Kuantan Singingi pada sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah struktur pertumbuhan ekonominya tetap pada peringkat kedua.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Pendapatan Per-Kapita Sebelum Otonomi (1995 hingga 1999) dan Setelah Otonomi Daerah periode (2014 hingga 2018)**

Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)			
Sebelum Otonomi	Rata-Rata	Setelah Otonomi	Rata-Rata
Kabupaten Indragiri Hulu	15.083.752.48	Kabupaten Indragiri Hulu	62.169.808.40
Indragiri Hilir	15.472.142.76	Indragiri Hilir	53.613.456.80
Kuantan Singingi*	12.893.456.86	Kuantan Singingi	64.983.559.00

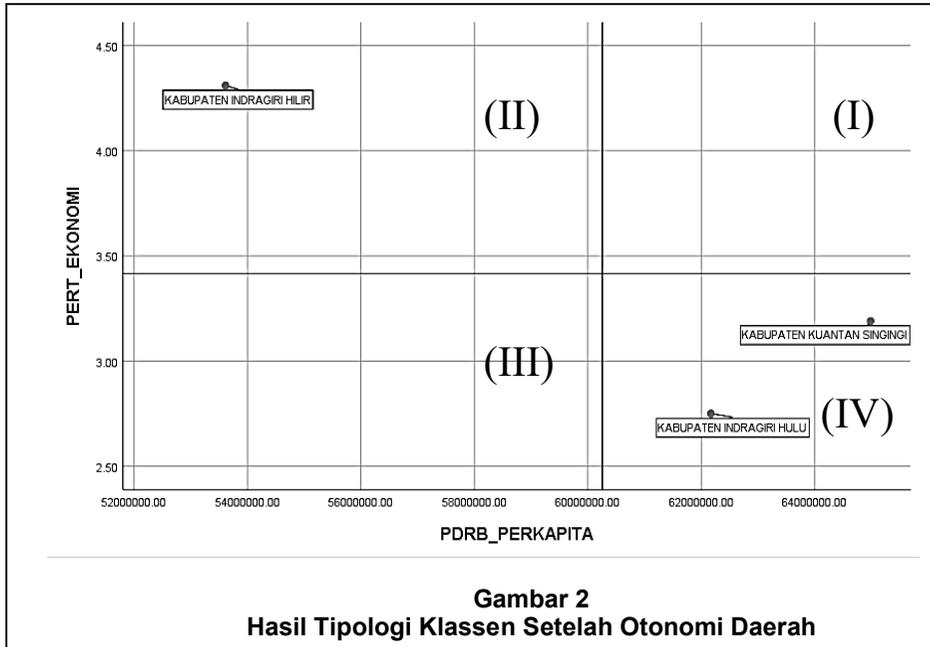
Sumber : Data Olahan (2020)

Pada tabel 3 menunjukkan pendapatan per-kapita sebelum dan setelah otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, pendapatan perkapita tertinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, dan pendapatan perkapita terendah adalah Kuantan Singingi. Setelah otonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi Kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita yang paling tinggi dan Indragiri Hilir menjadi Kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita terendah.



Dari gambar 1 menunjukkan bagaimana klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar daerah di wilayah Indragiri yaitu sebelum otonomi daerah (1995-1999) adalah Kabupaten Indragiri Hulu masuk kedalam daerah Kategori (I) dimana Daerah Cepat maju dan cepat tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan perkapita tinggi, sedangkan Kuantan Singingi Masuk kedalam kategori (II) yaitu daerah dengan klasifikasi berkembang cepat, dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Klasifikasi Wilayah Kategori (IV) yaitu daerah maju tapi tertekan.

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten Hasil Pemekaran Wilayah Indragiri  
(Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi)  
(Riko Handoko Harahap, H.B.Isyandi & Eka Armas Pailis)**



Dari Gambar 2 menunjukkan bagaimana klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar Kabupaten diwilayah Indragiri setelah Otonomi Daerah pada periode (2014-2018) hanya ada 2 Karakteristik wilayah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir masuk dalam Kategori (II) daerah dengan karakteristik wilayah berkembang, sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi masuk kedalam wilayah Kategori (IV) dengan wilayah Maju tapi tertekan.

Untuk lebih jelas bagaimana perbandingan klasifikasi Tipologi Klassen sebelum dan sesudah otonomi daerah bisa dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Perbandingan Tipologi Klassen Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah**

Klasifikasi Tipologi Klassen			
Sebelum Otonomi	Kategori	Setelah Otonomi	Kategori
Kabupaten Indragiri Hulu	Daerah Maju	Kabupaten Indragiri Hulu	Daerah Maju Tertekan
Indragiri Hilir	Daerah Maju Tertekan	Indragiri Hilir	Daerah Berkembang
Kuantan Singingi*	Daerah Berkembang	Kuantan singingi	Daerah Maju Tertekan

Sumber : Data Olahan (2020)

### Indeks Williamson

Ketimpangan wilayah diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini menggambarkan suatu indeks tertimbang dari koefisien variasi yang mengukur disperse pendapatan perkapita wilayah terhadap rata-rata pendapatan perkapita dari seluruh wilayah Indragiri dan jumlah penduduk wilayah terhadap seluruh penduduk daerah dalam wilayah Indragiri.

Indeks ini berkisar antara nol (0) sampai dengan satu (1), dimana pada kesimpulan akhirnya semakin tinggi nilai indeks tersebut maka ketimpangan pendapatan wilayah semakin besar. Dan sebaliknya semakin rendah nilainya maka ketimpangan semakin kecil.

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Indeks Williamson sebelum Otonomi Daerah**

1995	1996	1997	1998	1999	Rata-Rata
0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07

Sumber : Data Olahan (2020)

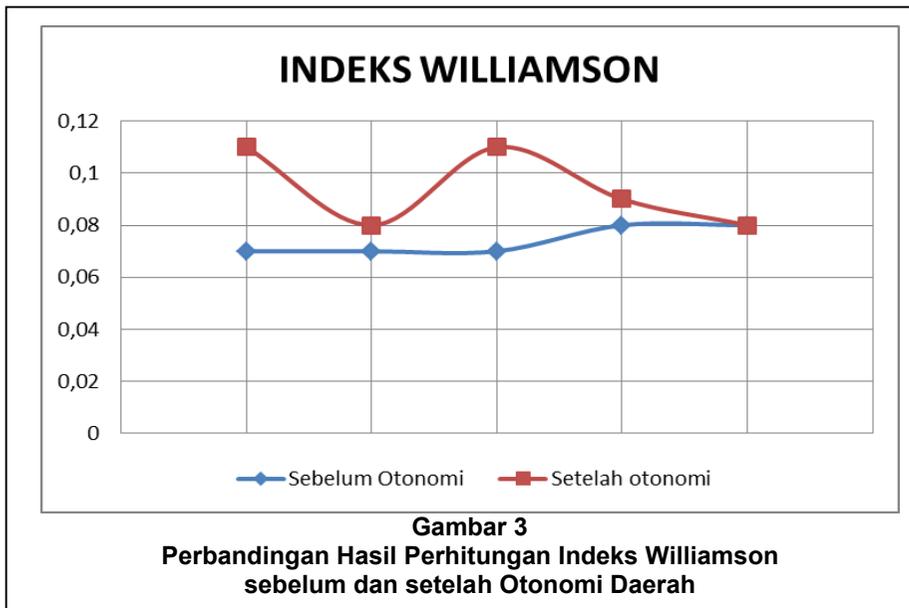
Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa pada sebelum otonomi daerah pada kurun waktu 1995-1999 ketimpangan pada wilayah Indragiri dengan nilai Indeks Williamson dengan rata-rata 0.07 yang artinya tingkat ketimpangan pada wilayah ini cukup rendah.

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan Indeks Williamson setelah Otonomi Daerah**

2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
0.11	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09

Sumber : Data Olahan (2020)

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa pada setelah otonomi daerah pada kurun waktu 2014-2018 ketimpangan pada wilayah Indragiri dengan nilai Indeks Williamson dengan rata-rata 0.09 yang artinya tingkat ketimpangan pada wilayah ini cukup rendah.



Dengan melihat gambar diatas terlihat bahwa perhitungan nilai ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson antar Kabupaten di wilayah Indragiri terlihat bahwa tingkat ketimpangan setelah otonomi daerah tingkat ketimpangan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan Indeks Williamson pada

kurun waktu sebelum Otonomi daerah, akan tetapi tingkat ketimpangan tersebut masih dalam kategori rendah dimana nilai Indeks Williamson dengan Rata-rata 0.09 yang berarti masih tergolong kecil tingkat ketimpangannya.

## **SIMPULAN & SARAN**

### **Simpulan**

Secara umum, Koridor wilayah Indragiri berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial walaupun ada pergeseran klasifikasi wilayah yang berubah pada era sebelum otonomi dan setelah otonomi yang disebabkan oleh transformasi struktur pemerintahan dan struktur ekonomi yang terjadi setelah dilakukannya otonomi daerah, walaupun demikian ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di wilayah Indragiri pada masa sebelum dan setelah era otonomi daerah dilakukan masih tergolong dalam ketimpangan pendapatan yang sangat kecil atau bisa dikatakan merata. akan tetapi ada beberapa hal yang harus dibenahi seperti masih rendahnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam Provinsi Riau, investasi yang menurun dan infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri, seperti banyaknya jalan yang rusak dan pelabuhan yang kurang efisien untuk dapat mendukung industri dan menggerakkan perekonomian masyarakat

### **Saran**

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus terus dilanjutkan oleh pemerintah secara konsisten Dalam mengatasi permasalahan dan lebarnya kesenjangan di wilayah masing-masing, dan pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan di wilayah. Bagi pemerintah daerah yang mengalami perlambatan dalam pembangunan untuk lebih memprioritaskan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, lapangan usaha dan lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan daerah yang kurang berkembang cepat.
2. Walaupun tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah Indragiri relatif rendah, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian terhadap masalah kesenjangan melalui pendekatan spasial atau wilayah seperti contohnya lebih meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adelman, Irma, and Cynthia T. M. 2014. "Patterns of Economic Growth, 1850–1914, or Chenery—Syrquin in Historical." *Economic Structure and Performance*.
- Dahlan, T. 2001. Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Researchgate.
- Dwi.N. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2004-2009. *Jurnal FE*. Universitas Sebelas Maret.
- Mukmin. M. 2017. *"Perencanaan Pembangunan"*. CV. Dua Bersaudara. Makasar.
- Sjafrizal, 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT Raja Grafindo Persada,